

PEMIKIRAN *PHILOSOPHER- PHILOSOPHER* ALIRAN PRAGMATISME DAN KRITIK TERHADAP PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:

Putu Sudira (07702261001)

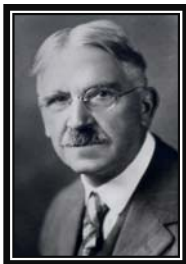
Hartoyo (07702261002)

Arief Hermawan (07702261003)

A. Pengantar

Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Bangsa Amerika. Demikian dekatnya pragmatisme dengan Amerika sehingga Popkin dan Stroll menyatakan bahwa pragmatisme merupakan gerakan yang berasal dari Amerika yang memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan intelektual di Amerika. Bagi kebanyakan rakyat Amerika, pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, asal dan tujuan, hakekat serta hal-hal metafisis yang menjadi pokok pembahasan dalam filsafat barat dirasakan amat teoritis. Rakyat Amerika umumnya menginginkan hasil yang kongkrit. Sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaan "*what is*" harus dieliminir dengan "*what for*". Menurut teori pragmatis tentang kebenaran, suatu proposisi dapat disebut benar sepanjang proposisi itu berlaku [*works*] atau memuaskan [*satisfies*] (Tauhid Bashori). Berikut disajikan pemikiran enam *philosopher* pragmatisme dan kritisi terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.

B. JOHN DEWEY



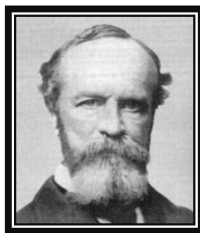
Gagasan filosofis Dewey yang terutama adalah problem pendidikan yang kongkrit, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Reputasinya terletak pada sumbangan pemikirannya dalam filsafat pendidikan progresif di Amerika. Pengaruh Dewey di kalangan ahli filsafat pendidikan sangat besar.

Pemikiran John Dewey banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin (1809-1882) yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses, dimulai dari tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Hidup tidak statis, melainkan bersifat dinamis. *All is in the making*, semuanya dalam perkembangan. Pandangan Dewey mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan.

Pengalaman (*experience*) adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Pengalaman merupakan keseluruhan aktivitas manusia yang mencakup segala proses yang saling mempengaruhi antara organisme yang hidup dalam lingkungan sosial dan fisik. Filsafat instrumentalisme Dewey dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan bergerak kembali menuju pengalaman. Untuk menyusun kembali pengalaman-pengalaman tersebut diperlukan pendidikan yang merupakan transformasi yang terawasi dari keadaan tidak menentu ke arah keadaan tertentu.

Sebagai tokoh pragmatisme, Dewey memberikan kebenaran berdasarkan manfaatnya dalam kehidupan praktis, baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa tugas filsafat memberikan garis-garis arahan bagi perbuatan.

C. William James



William James menominalisasikan pragmatisme sebagai teori *cash value*. James kemudian menyatakan: "*True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate, and verify. False ideas are those that we can not*" (Ide-ide yang benar menurut James adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya ide yang salah adalah ide yang tidak demikian. William James disebut sebagai *philosopher* agama.

James adalah tokoh pragmatisme yang lebih terkenal daripada Peirce. Dialah yang mempublikasikan ajaran pragmatisme. Dalam masa tokoh ini, pragmatisme mencapai keradikalannya. Dalam kata pengantar buku *The Will to Believe* (1903), James menulis sikap filsafatnya sebagai empirisme radikal. Dengan empirisnya James memaksudkan sebagai pandangan yang "*contented to regard its most assured conclusions concerning matters of future experience*".

Segi radikalnya terletak dalam perlakuannya terhadap ajaran monisme. Seperti kita ketahui, monisme adalah teori yang mengatakan bahwa dunia ini merupakan suatu entitas saja yang unik. Kebanyakan orang terutama kaum *philosopher* abad lalu memperlakukan tidak demikian. Keradikalannya, justru karena ajaran monisme sendiri ia perlakukan sebagai hipotesis. Pahaminya mengenai monisme adalah keanekaragaman hal yang membentuk suatu kesatuan yang dapat dimengerti.

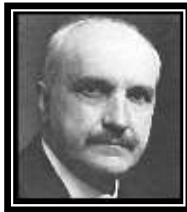
Dalam buku *Some Problems of Philosophy* (1911), James lebih tandas mengemukakan pendirian empirisme radikalnya. Di situ, ia melawankan empirisme dengan rasionalisme. Menurut James, para rasionalis adalah orang-orang prinsip. Sedangkan kaum empiris adalah orang-orang fakta. Seorang *philosopher* rasionalis sebagaimana dilihat James adalah orang yang bekerja dan menyelidiki sesuatu secara deduktif, dari yang menyeluruh menuju kebagian-bagian atau dari umum ke hal khusus.

Ia lebih senang menerangkan prinsip-prinsip sebagai proses induksi dari fakta. Di sana ia mengartikan kebenaran pertama-tama kebenaran itu merupakan suatu postulat, yaitu semua hal yang disatu pihak bisa ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman. Dilain pihak siap untuk diuji dengan diskusi. Kedua arti kebenaran itu merupakan suatu pernyataan fakta. Artinya segala hal yang ada sangkut-pautnya dengan pengalaman. Ketiga kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta, perumusan

kesimpulan ini sifatnya sudah kompleks. Inilah penegasan James mengenai kebenaran. Karena itu, bagi James, pragmatisme hanyalah merupakan suatu metode.

Dengan demikian pragmatisme James adalah metode untuk mencapai kejelasan pengertian kita tentang suatu obyek dengan cara menimbang dan menguji akibat-akibat praktis yang dikandung obyek tersebut.

D. George Santayana



George Santayana adalah anggota generasi yang membangun filsafat Amerika, seangkatan dengan John Dewey dan Willian James. Pemikiran-pemikiran Santayana merefleksikan beragam pengalaman hidupnya, yang merupakan penggabungan dari beberapa tradisi. Pemikiran-pemikiran Santayana ini sangat berbeda dengan pemikiran-pemikiran *philosopher* seangkatannya, ketika *philosophers* yang lain berusaha membuat filsafat itu “ilmiah” dan mengaplikasikan filsafat dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat liberal yang demokratis, Santayana lebih memilih ke nilai-nilai spiritual. Salah satu karyanya yang sangat populer adalah *The Last Puritan* (1936).

Salah satu kata-kata Santayana yang mengajarkan bahwa bagaimanapun buruknya masa lalu, kita harus mempelajarinya untuk merencanakan masa depan yang lebih baik adalah “Mereka yang tidak mempelajari sejarah akan didera mengulangi kesalahan masa lalu”

E. Johann Cristoph Friedrich Von Sciller



Johann Cristoph Friedrich Von Sciller, umumnya dikenal dengan nama Friedrich Schiller adalah penyair, *philosopher*, sejarawan dan dramatis Jerman.

Ketika gereja dianggap penggerak kekerasan terhadap

kebebasan mengutarakan pendapat, Schiller justru tampil mengambil sikap sebaliknya: menjunjung tinggi kebebasan. Dalam wacana ini termasuk kebebasan beragama, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan mengutarakan pendapat. Sudah pada usia muda Schiller selalu bersikap kritis pada ketidaksabaran dan fanatisme agama seperti pada karya romannya, *Don Carlos*. Dalam sebuah analisis filosofisnya dia berujar: "Bagi umat manusia tak ada sesuatu lebih hina dari pada menderita siksaan kekerasan. Siapa melakukan kekerasan pada diri kita, dia menginjak-injak harkat kemanusiaan kita. Sebaliknya, siapa secara pengecut bertekuk-lutut di depan kekerasan, dia menginjak-injak harkat kemanusiaannya sendiri." Schiller menampilkan fanatisme agama lewat naratornya, seorang pemuka agama, dalam sebuah khotbah penuh cacimaki pada kebebasan mengutarakan pendapat yang dianggapnya mengancam dasar-dasar moral dalam kepercayaan dan ajaran gereja.

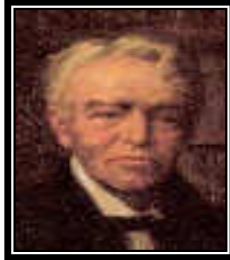
Salah satu penggalan sajak Sciller yang terkenal adalah "und setzt ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein—yang maknanya: hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan".

F. Charles Sanders Peirce



Charles Sanders Peirce (1839-1914) adalah bapak filsafat Amerika dan pendiri pragmatisme. Pierce mengatakan, "Tidak ada perbedaan makna yang sedemikian jelas dalam segala sesuatu selain perbedaan pelaksanaan (praktis)". Ia menerapkan teori makna pragmatis ini secara luas dalam kegiatan ilmiah dan praktis. Pierce berpendapat bahwa ilmu pengetahuan menawarkan satu-satunya metode yang sesuai untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Seluruh keyakinan kita pada dasarnya dapat salah dan selalu dapat direvisi berdasar pada bukti-bukti yang tidak lengkap dan berubah-ubah.

G. Josiah Royce



Pemikiran Josiah Royce ([1855-1916](#)) sangat dipengaruhi oleh absolutisme Hegelian, namun juga menaruh simpati cukup dalam terhadap pragmatisme, Royce mengembangkan perpaduan yang unik antara keduanya. Menekankan individualisme diri manusia, sekaligus menyadari bahwa diri individual manusia merupakan bagian dari komunitas diri-diri yang lebih luas – teman, keluarga, rekan kerja – yang masing-masing menginterpretasikan diri kepada yang lain. Mencoba menerjemahkan ide-ide kristen tentang dosa dan pengampunan kedalam istilah-istilah komunal dan menawarkan suatu cara untuk mengatasi penyakit yang terlalu berpusat pada diri sendiri, alienasi, dan kejahatan, melalui kesetiaan kepada komunitas besar/tercinta.

H. Tinjauan Kritis Sistem Pendidikan Nasional

Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa pragmatisme merupakan filsafat bertindak. Dalam menghadapi berbagai persoalan, baik bersifat psikologis, epistemologis, metafisik, religius dan sebagainya. Pragmatisme selalu mempertanyakan bagaimana konsekuensi praktisnya. Setiap solusi terhadap masalah apa pun selalu dilihat dalam rangka konsekuensi praktisnya, yang dikaitkan dengan kegunaannya dalam hidup manusia.

Kaum pragmatis selalu mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Kaum pragmatis adalah manusia-manusia empiris yang sanggup bertindak, tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan secara nyata

berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan yang konkrit.

Karenanya, teori bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandeg dalam teori itu sendiri. Teori yang tepat adalah teori yang berguna, yang siap pakai, dan yang dalam kenyataannya berlaku, memungkinkan manusia bertindak secara praktis. Kebenaran suatu teori, ide atau keyakinan bukan didasarkan pada pembuktian abstrak, melainkan didasarkan pada pengalaman, pada konsekuensi praktisnya, dan pada kegunaan serta kepuasan yang dibawanya. Pendeknya, ia mampu mengarahkan manusia kepada fakta atau realitas yang dinyatakan dalam teori tersebut.

Bagi kaum pragmatis, yang penting bukan keindahan suatu konsepsi melainkan hubungan nyata pada pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu gagasan atau strategi terbukti benar apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah situasi yang penuh keraguan dan keresahan sedemikian rupa, sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang.

Dalam kedua sifat tersebut terkandung segi negatif pragmatisme dan segi-segi positifnya. Pragmatisme, misalnya, mengabaikan peranan diskusi. Justru di sini muncul masalah, karena pragmatisme membuang diskusi tentang dasar pertanggungjawaban yang diambil sebagai pemecahan atas masalah tertentu. Sedangkan segi positifnya tampak pada penolakan kaum pragmatis terhadap perselisihan teoritis, pertarungan ideologis serta pembahasan nilai-nilai yang berkepanjangan, demi sesegera mungkin mengambil tindakan langsung.

Dalam kaitan dengan dunia pendidikan, kaum pragmatisme menghendaki pembagian yang tetap terhadap persoalan yang bersifat teoritis dan praktis. Pengembangan terhadap yang teoritis akan memberikan bekal yang bersifat etik dan normatif, sedangkan yang praktis

dapat mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasi yang teoritis dan praktis itu penting agar pendidikan tidak melahirkan materialisme terselubung ketika terlalu menekankan yang praktis. Pendidikan juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis masyarakat, sebab kalau demikian yang terjadi berarti pendidikan tersebut dapat dikatakan disfungsi, tidak memiliki konsekuensi praktis.

Pendidikan tidak boleh stagnan, apalagi berhenti dan bahkan mundur, baik dalam arti teori maupun praksisnya (Suyanto). Terjadi perubahan signifikan dan mendasar dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam kebijakan ditetapkan menggunakan prinsip demokrasi. Hal ini tertuang dalam Bab III Pasal 4 UU Sisdiknas.

Selaras dengan pemikiran Dewey perubahan-perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan guna mengimbangi perkembangan zaman yang semakin pesat. Perkembangan pemanfaatan teknologi ICT memacu pertumbuhan IPTEKS secara amat cepat. Karenanya perlu pembenahan dari waktu ke waktu secara sistemik, terbuka, multimakna. Kebijakan pendidikan harus pragmatis menuju proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan Pendirian Negara Republik Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Walaupun pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan selama ini telah mencapai berbagai keberhasilan, namun masih menghadapi masalah dan tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan pendidikan dimaksud telah diidentifikasi dan dirumuskan dalam Rencana

Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, yaitu meliputi: (1) Masih rendahnya pemerataan dan akses pendidikan, (2) Masih rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta (3) Masih lemahnya tatakelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Renstra Depdiknas 2005-2009 telah merumuskan tiga pilar kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional yaitu: (a) Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (b) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta (c) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam sudut pandang pragmatis teoritis baik. Persoalannya terletak pada aspek-aspek praktisnya. Sebaik apapun konsep undang-undang jika tidak terlaksana dengan baik di lapangan akan kehilangan makna pragmatisnya. Karena kemanfaatan kebijakan pendidikan benar jika memberi nilai riil sebagaimana pendapat Dewey.

Kebijakan Depdiknas tentang pemerataan dan perluasan pendidikan serta kebijakan governance dan akuntabilitas sangat sarat dengan beban non substansial pendidikan bermutu yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap kebutuhan pasar. Kebijakan BOS, bantuan sarana prasarana, USB, RKB, perluasan akses PAUD, perluasan akses SMA/SMK/PT, Pendidikan Ketrampilan Hidup, merupakan kebijakan yang sarat dengan beban investasi ketimbang aktivitas pendidikan. Sehingga sangat sulit diharapkan adanya perbaikan mutu pendidikan. Bila tidak hati-hati sangat mungkin akan terjadi penurunan struktural korupsi sampai kepada penanggungjawab di tingkat sekolah.

Kebijakan Depdiknas tentang governance dan akuntabilitas terjebak kepada aspek pengelolaan pendidikan yang belum bersih, efektif, efisien, produktif, akuntabel. Pendidikan sebagai suatu proses transformasi sulit tumbuh pada ranah yang benar jika pengelolanya saja tidak bersih, pengelolaannya belum efektif, efisien, produktif, akuntabel.

Kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran pendidikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah masih belum memadai. Lemahnya strategi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan karena tidak cukupnya tenaga pelaksana yang kompeten melingkupi hasil pendidikan kita yang masih terkesan jalan ditempat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Santayana "Mereka yang tidak mempelajari sejarah akan didera mengulangi kesalahan masa lalu", Mestinya kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah tersusun dengan baik itu tidak hanya tersusun dalam ranah rencana tapi dalam evaluasinya pun perlu dilakukan dengan baik, sehingga ke depan pelaksanaan rencana kebijakan tersebut selalu "on track"

Kebijakan mutu dan relevansi dengan mengimplementasikan dan menyempurnakan standar nasional pendidikan (SNP) dan BSNP digunakan sebagai dasar penataan berbagai aspek perbaikan mutu.

Pada kenyataannya permasalahan-permasalahan pendidikan saat ini adalah masih kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Program-studi yang ada kebanyakan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di bidang industri (industrialisasi) yang nota bene hanya mengadopsi dari barat, dan tidak berpijak pada situasi lingkungannya. Ini terbukti tidak banyak program-program studi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pada hal Indonesia adalah negara agraris, kelautan, kehutanan, dan kaya akan sumber daya alam. Bidang-bidang tersebut belum tergarap dengan optimal, yang semestinya potensi-potensi yang ada harus digarap dan dikembangkan. Mestinya di daerah pedesaan harus dikembangkan sekolah pertanian yang baik, di daerah pantai juga di kembangkan sekolah kelautan. Wilayah yang mempunyai hutan harus dikembangkan sekolah kehutanan yang baik. Wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam tertentu juga harus dikembangkan sesuai dengan potensi wilayahnya. Penyelenggaraan pendidikan kurang dilakukan dengan perencanaan yang baik, tidak didasarkan pada asesmen tentang kebutuhan tenaga kerja dan asesmen tentang potensi wilayah. Sebagai akibatnya antara pendidikan

dan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan tidak *link* dan *match*, banyak pengangguran, masalah urbanisasi, karena banyak tenaga kerja yang mencari kerja di kota sebagai basis industri. Akibat urbanisasi juga menyebabkan pergeseran nilai. Dengan demikian akan berakibat kepada masalah sosial yang kompleks.

Dalam kaitannya dengan relevansi, penyelenggaraan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan sifat pragmatisme yaitu salah satunya dapat memecahkan permasalahan yang ada. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan benar dan sebaik mungkin dengan melibatkan semua komponen dan seluruh warga masyarakat.

Sangat disadari bahwa pembangunan pendidikan nasional akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila ada komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah dan terutama peran serta dari seluruh masyarakat. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat Royce. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang sistematis untuk peningkatan komitmen serta penyamaan persepsi yang lebih komprehensif terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang telah ada dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Selain itu, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan guna lebih memberikan arah (*mainstreaming*) bagi pembangunan pendidikan nasional terutama dalam memberikan kontribusi lebih luas dan lebih terarah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pustaka:

----- (2004), *Rencana Strategis Departemen Pendidikan nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.

Suyanto, Prof.Ph.D.(2006) *Di Belantara Pendidikan Bermoral*, UPP UNY.

Tauhid Bashori. *Pragmatisme Pendidikan (Telaah atas Pemikiran John Dewey)*, <http://www.geocities.com>

Wardiman Djojonegoro, 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui SMK*. Jakarta.

<http://www.philosophypages.com>